KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR-GOPAC satu visi hadang korupsi kakap
Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR-GOPAC Satu Visi Hadang Korupsi Kakap

DPR menjadi tuan rumah Sidang Umum keenam GOPAC (Global Conference of Parliamentarians Against Corruption) yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta 5-8 Oktober 2015.

Organisasi global yang didukung 170 anggota parlemen antikorupsi dari 50 negara, akan memberikan perhatian pada penanganan *grand corruption* (korupsi kakap) dengan tema *Bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity.*

Sebelumnya dalam forum yang berlangsung di Panama, GOPAC telah membuat resolusi agar UNCAC (Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi) dapat mengakui korupsi kakap sebagai salah satu kejahatan hak asasi manusia. Diusulkan pula agar proses peradilan korupsi dalam skala besar ini diselesaikan di Internasional Criminal Court (Pengadilan Kriminal Internasional).

"Keterlibatan DPR dalam sidang GOPAC kali ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap resolusi tersebut dan juga sebagai tempat untuk mempelajari dan memperdalam mekanisme yang akan diajukan GOPAC," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Jakarta, kemarin.

Dalam sidang di Yogyakarta nanti, lanjutnya, DPR ingin menggali lebih dalam mengenai proses penuntutan kejahatan korupsi ke level internasional yang memiliki beragam konsekuensi baik politis maupun legal. Dalam aspek legal, misalnya, kerangka internasional yang seperti apa yang dibutuhkan untuk proses tersebut? Apakah melalui mahkamah pidana internasional atau pengadilan internasional yang baru?

"Ini yang akan kita bahas secara khusus bersama pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana dan John Hyde, Ketua GOPAC Oceania," tutur Fadli.

Bicara pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan memasukkan persoalan demokrasi biaya tinggi sebagai salah satu bahasan sesi diskusi.

Menurutnya, seorang politisi sering kali dipengaruhi kebutuhan untuk meminta sumbangan dari kepentingan khusus untuk membiayai kampanye pemilu dan merasa wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada penyumbang.

Politikus Fraksi Partai Demokrat itu menyebut akar korupsi parlemen adalah cara pembiayaan parpol. Di beberapa negara, misalnya Australia, parpol diizinkan berbisnis. Di negara lain pembiayaan parpol juga dapat ditelusuri dari data pembayar pajak. Di Indonesia pernah berkembang pembiayaan parpol dari APBN.

Sidang Umum keenam GOPAC juga menghadirkan sejumlah organisasi yang menjadi partner seperti PBB, IDB, termasuk juga mendengar masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sesi diskusi. (RO/P-4)

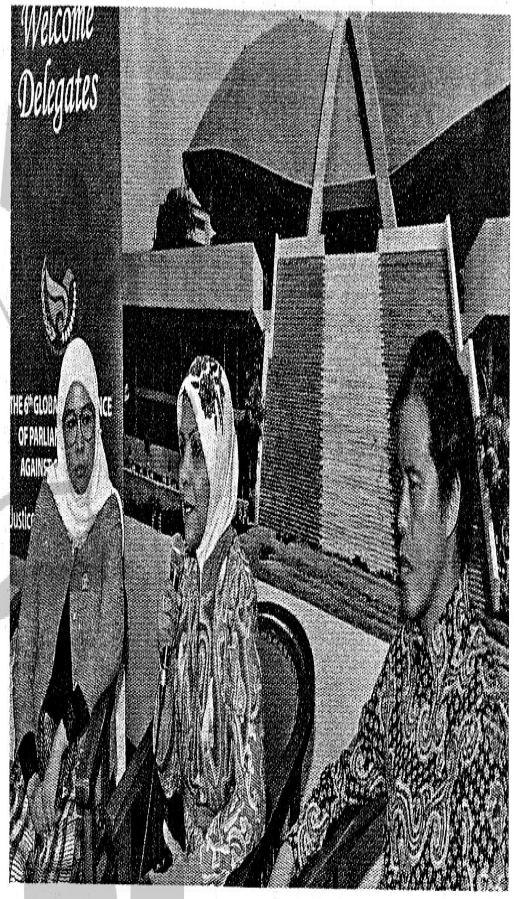

M/M IRFAN

MANFAAT PELAKSANAAN GOPAC: Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf (tengah) bersama anggota DPR Fraksi Golkar Dwi Arum dan anggota Fraksi NasDem Hamdani menjadi pembicara dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Diskusi itu mengangkat tema *Pelaksanaan Sidang ke-6 Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).*